

**Ranah Research**

E-ISSN: 2655-0865

Journal of Multidisciplinary Research and Development

☎ 082170743613

✉ ranahresearch@gmail.com🌐 <https://jurnal.ranahresearch.com>DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v8i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Kebijakan Tentang Angka Putus Sekolah Pada Kota Sukabumi

Ateng Sutisna¹, Dawia Nur Azizah², Ike Rachmawati³¹Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Sukabumi, Indonesia, ateng.sarbi@gmail.com²Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Sukabumi, Indonesia, dawiadawia88@gmail.com³Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Sukabumi, Indonesia, ike_rachmawati1@yahoo.comCorresponding Author: ateng.sarbi@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of policies to address the school dropout rate (APS) in Sukabumi City. Although the APS at the elementary/Islamic elementary school (SD/MI) level is almost negligible, problems persist at the junior high/Islamic junior high school (SMP/MTs) level, particularly in areas with high socio-economic vulnerability. The research employs a descriptive qualitative approach, utilizing primary data from interviews with the Head of the Education and Culture Office of Sukabumi City and secondary data from official documents and local media. The findings reveal that the causes of APS include economic constraints, low learning motivation, early marriage, administrative barriers, and cultural influences. Strategies implemented include the School Dropout Tracking Program (PAPS), family mentoring, equivalency education, and mapping of APS-prone areas involving various stakeholders. Challenges encountered include data accuracy and integration, cultural resistance, and the impact of class quota policies on private schools. Assistance programs such as BOS, PIP, and Smart Cards play a role in preventing APS but have not yet been fully optimized. This study recommends strengthening area-based data systems, improving the effectiveness of educational assistance, fostering program innovation, and empowering communities to ensure equitable access to education.*

Keywords: *school dropout rate, education policy, Sukabumi City, PAPS, educational equity.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan angka putus sekolah (APS) di Kota Sukabumi. Meskipun APS pada jenjang SD/MI hampir nihil, permasalahan masih terjadi pada jenjang SMP/MTs, khususnya di wilayah dengan kerentanan sosial-ekonomi tinggi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan sumber data primer melalui wawancara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi serta data sekunder dari dokumen resmi dan media lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab APS meliputi keterbatasan ekonomi, rendahnya motivasi belajar, pernikahan dini, kendala administratif, dan pengaruh budaya. Strategi yang diterapkan meliputi Program Pelacakan Anak Putus Sekolah (PAPS), pendampingan keluarga, pendidikan kesetaraan, dan pemetaan daerah rawan APS dengan melibatkan berbagai pihak. Kendala yang dihadapi antara lain akurasi dan integrasi data, resistensi budaya, serta dampak kebijakan kuota rombongan belajar terhadap sekolah swasta.

Program bantuan seperti BOS, PIP, dan Kartu Cerdas berperan mencegah APS namun belum dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pendataan berbasis wilayah, peningkatan efektivitas bantuan pendidikan, inovasi program, dan pemberdayaan masyarakat untuk menjamin pemerataan hak pendidikan.

Kata kunci: angka putus sekolah, kebijakan pendidikan, Kota Sukabumi, PAPS, pemerataan pendidikan.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan landasan utama dalam pembentukan masyarakat yang berdaya saing dan berkeadaban. Pendidikan merupakan upaya untuk mentransformasikan nilai, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan tidak hanya terbatas pada kegiatan formal di sekolah, tetapi juga meliputi proses non-formal dan informal yang berlangsung seumur hidup, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun tempat kerja. Menurut Ki Hadjar Dewantara (dalam Suryana dan Muthar 2022) bahwa “Pendidikan adalah suatu proses mengajak manusia terhindar dari kebodohan. Pendidikan juga dikatakan sebagai usaha untuk memperbaiki budi pekerti, pikiran, dan jasmani agar dapat mewujudkan kesempurnaan hidup”. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sebagai alat strategis dalam membentuk karakter bangsa, memperkuat identitas nasional, serta menciptakan masyarakat yang demokratis dan berkeadaban.

Jaminan atas hak pendidikan telah ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 31 serta dioperasionalkan dalam berbagai kebijakan nasional dan daerah. realitas di lapangan menunjukkan bahwa hak atas pendidikan belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh anak bangsa. Salah satu indikator kritis yang merefleksikan kegagalan dalam menjamin akses pendidikan adalah tingginya angka putus sekolah (APS). Menurut Silalahi *et al.*, (2025) bahwa “Angka putus Sekolah Dasar Negeri cenderung lebih tinggi dibandingkan di sekolah swasta, terutama di provinsi-provinsi dengan angka putus sekolah tertinggi. Faktor seperti keterbatasan fasilitas dan kondisi sosial ekonomi menjadi penyebab utamanya”. Putus sekolah bukan sekadar angka statistik, melainkan gejala sosial yang kompleks dan menyimpan potensi krisis jangka panjang.

Putus sekolah adalah kondisi di mana seorang peserta didik berhenti mengikuti kegiatan pendidikan formal sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan yang seharusnya baik pada tingkat dasar, menengah, maupun atas dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Menurut Assa *et al.*, (2022) bahwa “Putus sekolah merupakan predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya”. Anak-anak yang keluar dari sistem pendidikan formal secara prematur berisiko mengalami kemiskinan struktural, terbatasnya peluang kerja formal, serta peningkatan potensi keterlibatan dalam kegiatan negatif seperti pernikahan dini, eksploitasi tenaga kerja anak, hingga kriminalitas. tingginya APS juga memperlemah produktivitas daerah, memperlebar kesenjangan sosial, dan menurunkan kualitas sumber daya manusia yang berujung pada terhambatnya pembangunan berkelanjutan. Menurut Fiqih *et al.*, (2021) bahwa “Faktor penyebab peserta didik yang putus sekolah atau rentan putus sekolah adalah peserta didik yang kondisi ekonomi keluarganya kurang mampu, sehingga orang tua tidak mampu membiayai pendidikan anak, yang terpaksa anak bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dan ada pula keinginan anak itu sendiri tidak mau sekolah”. Putus sekolah dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti faktor ekonomi, sosial, keluarga, lingkungan, motivasi belajar yang rendah, atau bahkan keterbatasan akses terhadap pendidikan.

Kota Sukabumi merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi permasalahan APS secara nyata. Meskipun data Open Data Kota Sukabumi mencatat bahwa pada jenjang SD/MI angka putus sekolah menunjukkan angka 0% selama periode 2020–2024, kondisi di jenjang pendidikan menengah belum mencerminkan capaian serupa (Kebudayaan 2025). Pada tingkat SMP/MTs, angka putus sekolah masih terjadi dan menjadi perhatian serius, terutama karena terjadi pada usia kritis transisi remaja yang sangat rentan terhadap pengaruh ekonomi, sosial, dan budaya (Kebudayaan 2025). Data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi pada tahun 2025 menyebutkan bahwa sekitar 600 anak usia sekolah dasar dan menengah teridentifikasi mengalami putus (Redaksi 2025). Permasalahan ini tersebar di hampir seluruh kelurahan, menjadikan isu ini bukan hanya masalah sektoral, melainkan persoalan sistemik yang menuntut pendekatan lintas sektor dan lintas level pemerintahan.

Faktor utama yang mendorong tingginya angka putus sekolah di Kota Sukabumi adalah kemiskinan struktural, di mana anak-anak terpaksa bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, kendala administratif dalam kependudukan, serta mobilitas penduduk yang tinggi memperparah kesulitan dalam pendataan dan penanganan kasus. Banyak anak yang tidak tercatat dalam sistem, berpindah domisili, atau tidak melaporkan secara resmi, sehingga menyebabkan data APS sering kali tidak akurat dan menyulitkan intervensi kebijakan (Redaksi 2025). Kebijakan pemerintah daerah dan provinsi terkadang justru menciptakan ketimpangan baru. Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang menaikkan jumlah rombongan belajar menjadi 50 siswa per kelas (KDM) untuk sekolah negeri berdampak serius pada eksistensi sekolah swasta di Sukabumi. Sekolah-sekolah swasta mengalami penurunan pendaftar drastis, dan sebagian bahkan terancam tutup (Salam 2025). Hal ini dapat mempersempit pilihan akses pendidikan dan memperbesar potensi anak putus sekolah jika lembaga alternatif tidak tersedia atau tidak terjangkau. Ironisnya meskipun berbagai program bantuan pendidikan telah tersedia, seperti BOS, PIP, dan Kartu Cerdas, efektivitasnya masih terhambat oleh minimnya pendataan berbasis kebutuhan riil, kurangnya sosialisasi, serta ketimpangan distribusi antar wilayah. Ini menunjukkan bahwa masalah APS di Kota Sukabumi bukan sekadar persoalan bantuan biaya, tetapi juga menyangkut efektivitas implementasi kebijakan, koordinasi lintas lembaga, serta kapasitas pengawasan dan penjangkauan terhadap kelompok rentan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat ditegaskan bahwa tingginya angka putus sekolah di Kota Sukabumi merupakan permasalahan pendidikan yang bersifat struktural, sistemik, dan berdampak luas, sehingga tidak cukup ditangani melalui pendekatan sektoral dan program simbolik semata. Diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana kebijakan yang ada diimplementasikan di lapangan, apa saja kendala utama yang dihadapi, serta sejauh mana kebijakan tersebut berhasil menjangkau kelompok paling rentan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif implementasi kebijakan penanggulangan angka putus sekolah di Kota Sukabumi, dengan menelaah realitas pelaksanaan, tantangan teknis dan non-teknis, serta efektivitas sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan aktor lokal lainnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan yang lebih adil, akuntabel, dan berbasis kebutuhan lokal untuk menjamin hak setiap anak atas pendidikan yang layak dan bermutu.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan angka putus sekolah di Kota Sukabumi. Menurut Sugiyono (2020) bahwa “Penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fenomena atau kejadian

yang terjadi secara alami, dan dilakukan dalam kondisi yang wajar (*natural setting*). Peneliti merupakan instrumen utama, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta dianalisis secara induktif". Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memahami secara mendalam dinamika pelaksanaan kebijakan dari perspektif pelaksana di tingkat daerah. Lokasi penelitian berada di Kota Sukabumi dan dilaksanakan pada April hingga Juli 2025.

Sumber data utama diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi sebagai informan kunci. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi terkait proses pelaksanaan kebijakan, hambatan yang dihadapi, serta strategi yang digunakan untuk menekan angka putus sekolah. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan kinerja dinas pendidikan, data dari portal Open Data Kota Sukabumi periode 2020–2024, serta artikel media lokal seperti Radar Sukabumi dan Sukabumikita.id. Data dianalisis secara tematik, dengan proses reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi antar sumber untuk memastikan validitas informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Angka putus sekolah (APS) merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan sistem pendidikan di suatu daerah. Menurut Paramata *et al.* (2024) bahwa "Angka putus sekolah adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu". Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, diperoleh gambaran bahwa angka putus sekolah (APS) di jenjang SD/MI dalam beberapa tahun terakhir relatif nihil, namun pada jenjang SMP/MTs permasalahan masih terjadi, terutama di wilayah pinggiran yang memiliki tingkat kerentanan sosial-ekonomi tinggi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun jumlah kasus APS di tingkat SMP/MTs tidak terlalu besar, hal ini tetap menjadi perhatian serius karena usia tersebut merupakan masa transisi krusial bagi pembentukan karakter dan kesiapan kerja. Faktor penyebab utama APS adalah keterbatasan ekonomi yang memaksa anak-anak membantu orang tua mencari penghasilan, ditambah rendahnya motivasi belajar, pernikahan dini, dan kendala administratif seperti belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Kondisi angka putus sekolah di jenjang SD/MI sudah sangat baik, bahkan hampir nihil berdasarkan data beberapa tahun terakhir. Tetapi, untuk tingkat SMP/MTs, kita masih menghadapi tantangan. Masih ada sejumlah siswa yang berhenti sekolah, terutama di wilayah pinggiran atau yang ekonomi keluarganya lemah. Meskipun secara kuantitas tidak terlalu besar, tapi ini harus jadi perhatian serius karena usia SMP adalah masa transisi yang krusial bagi pembentukan karakter dan kesiapan kerja".

Pernyataan ini selaras dengan pendapat Madaniah bahwa "Faktor-faktor yang menyebabkan anak putus sekolah di Indonesia disebabkan oleh: tingkat pendidikan para orangtua; daya akses anak terhadap pendidikan, persepsi akan pentingnya pendidikan; kondisi lingkungan tempat tinggal anak yang menyebabkan anak masih sekolah terpengaruh untuk berhenti sekolah akibatnya banyaknya anak-anak lain yang putus sekolah; dan pandangan masyarakat terhadap pendidikan yang belum sepenuhnya menganggap pendidikan itu adalah hal yang menjadi prioritas utama dalam hidup" (Madaniah *et al.* 2023).

Dinas Pendidikan telah menjalankan beberapa kebijakan strategis, seperti Program Pelacakan Anak Putus Sekolah (PAPS) untuk menjangkau siswa putus sekolah atau yang berisiko putus sekolah, pendampingan keluarga, penguatan program Pendidikan Kesetaraan, serta pemetaan daerah rawan APS. Proses implementasi melibatkan UPTD, guru BK, kepala sekolah, perangkat kelurahan, RT/RW, serta tokoh masyarakat, dan didukung dengan

penyusunan SOP penanganan APS yang disosialisasikan ke seluruh satuan pendidikan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa

“Kami memiliki beberapa program strategis, seperti Pelacakan Anak Putus Sekolah (PAPS), pendampingan keluarga, serta penguatan program Pendidikan Kesetaraan. Kami melakukan pemetaan daerah rawan APS dan menjalin kemitraan dengan kelurahan dan tokoh masyarakat untuk menjangkau langsung anak-anak yang putus sekolah, ini adalah bagian dari pendekatan berbasis komunitas yang mulai kami dorong”.

Program PAPS ini sejalan dengan konsep identifikasi dini (*early detection system*) yang direkomendasikan oleh UNESCO, di mana anak yang berisiko putus sekolah harus diidentifikasi sebelum keluar dari sistem pendidikan, sehingga intervensi dapat dilakukan secara cepat.

Dinas Pendidikan telah menjalankan beberapa kebijakan strategis, seperti Program Pelacakan Anak Putus Sekolah (PAPS) untuk menjangkau siswa putus sekolah atau yang berisiko putus sekolah, pendampingan keluarga, penguatan program Pendidikan Kesetaraan, serta pemetaan daerah rawan APS. Proses implementasi melibatkan UPTD, guru BK, kepala sekolah, perangkat kelurahan, RT/RW, serta tokoh masyarakat, dan didukung dengan penyusunan SOP penanganan APS yang disosialisasikan ke seluruh satuan pendidikan.

“Proses implementasi melibatkan berbagai pihak, tidak hanya sekolah. Kami libatkan UPTD, guru BK, kepala sekolah, perangkat kelurahan, bahkan RT/RW. Kami juga menyusun SOP penanganan kasus APS yang disosialisasikan ke seluruh satuan pendidikan.”

Faktor penyebab APS di Kota Sukabumi pun bersifat multidimensi. Hasil wawancara menegaskan bahwa

“Yang paling umum memang faktor ekonomi. Banyak anak yang harus membantu orang tuanya mencari penghasilan, terutama setelah pandemi. Tapi juga ada faktor lain seperti kurangnya motivasi belajar, pernikahan dini, hingga masalah administrasi kependudukan seperti belum memiliki NIK.”

Kondisi ini sejalan dengan pandangan Silalahi et al. (2025) bahwa faktor sosial-ekonomi, kultural, dan administratif saling berinteraksi dalam meningkatkan risiko APS.

Salah satu hambatan signifikan adalah keakuratan data. Hasil wawancara menyebutkan bahwa

“Kami sedang membangun sistem pendataan berbasis kelurahan untuk mendukung data dari sekolah. Beberapa kasus kami temukan anak-anak yang sudah pindah domisili tapi belum tercatat di sistem baru. Sehingga, kami mendorong verifikasi langsung ke lapangan dengan melibatkan kader pendidikan atau relawan yang kami latih”.

Upaya ini menunjukkan kesesuaian dengan prinsip manajemen data pendidikan berbasis wilayah, di mana pelibatan aktor lokal menjadi kunci ketepatan data.

Aspek dukungan bantuan pendidikan, program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Kartu Cerdas sangat membantu dalam mencegah APS, namun pemanfaatannya belum optimal. Menurut Zanata et al. (2023) bahwa “Program Kartu Cerdas adalah program Pemerintah Kota Sukabumi yang bertujuan memberikan dana stimulan pendidikan berupa beasiswa kepada masyarakat Kota Sukabumi dari golongan ekonomi yang kurang mampu”. Beberapa keluarga tidak mengetahui prosedur pengajuan bantuan atau mengalami kesulitan teknis dalam melengkapi persyaratan administrasi. Sebagai solusi, Dinas membuka posko bantuan pendidikan di beberapa kelurahan untuk mempermudah akses layanan dan memberikan edukasi tentang hak-hak pendidikan kepada masyarakat. Hasil wawancara menyatakan bahwa:

“Program-program itu sangat membantu, tapi memang ada beberapa kendala teknis. Misalnya banyak keluarga yang tidak tahu cara mengaksesnya, atau

kesulitan mengisi dokumen. Maka dari itu, kami sekarang membuka posko bantuan pendidikan di beberapa kelurahan agar lebih mudah dijangkau. Edukasi tentang hak-hak pendidikan juga kami perkuat”.

Peran sekolah swasta juga menjadi perhatian penting dalam konteks penanggulangan angka putus sekolah di Kota Sukabumi. Hasil wawancara menegaskan bahwa

“Peran sekolah swasta sangat penting, terutama dalam menampung anak-anak yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Tapi setelah kebijakan 50 siswa per rombel di sekolah negeri, banyak sekolah swasta yang kekurangan murid, hal ini berdampak pada keberlangsungan mereka. Bila sekolah swasta tutup, maka opsi pendidikan akan berkurang, dan anak-anak yang tidak tertampung bisa berisiko putus sekolah”.

Hal ini menunjukkan bahwa sekolah swasta memiliki fungsi strategis sebagai penyangga daya tampung pendidikan formal, terutama ketika sekolah negeri tidak mampu menampung seluruh calon peserta didik. Menurut Perwita dan Widuri (2022) bahwa “Pendidikan swasta merupakan pilihan kedua yang dapat ditempuh setelah pendidikan negeri terpenuhi”. Pemerataan akses pendidikan, kehadiran sekolah swasta menjadi salah satu instrumen untuk memastikan setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang setara, tanpa terhambat oleh keterbatasan infrastruktur atau kuota di sekolah negeri.

Kendala teknis dan non-teknis juga menjadi bagian penting pembahasan. Kebijakan ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Secara teknis, pengolahan dan integrasi data siswa antar sistem belum optimal, sehingga diperlukan sistem pendataan berbasis kelurahan dengan verifikasi langsung ke lapangan. Secara non-teknis, terdapat resistensi budaya yang memandang pendidikan formal tidak menjamin masa depan, serta pandangan bahwa anak perempuan cukup bersekolah hingga tingkat SMP. Kebijakan pemerintah provinsi yang menetapkan jumlah rombongan belajar di sekolah negeri hingga 50 siswa per kelas berdampak pada berkurangnya murid di sekolah swasta, yang pada gilirannya mengancam keberlangsungan sekolah tersebut dan berpotensi meningkatkan risiko APS. Hasil wawancara menuturkan bahwa

“Secara teknis pengolahan dan integrasi data antar sistem masih menjadi tantangan. Sedangkan non-teknisnya, kami menghadapi resistensi budaya, masih ada anggapan di masyarakat bahwa sekolah tidak menjamin masa depan, atau bahwa anak perempuan cukup sekolah sampai SMP. Hal ini yang coba kami ubah dengan pendekatan sosialisasi dan tokoh masyarakat”.

Evaluasi kebijakan dilakukan secara berkala sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan peningkatan mutu program penanggulangan angka putus sekolah. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa

“Kami lakukan monitoring triwulan dan tahunan. Setiap sekolah wajib melaporkan perkembangan siswa berisiko putus sekolah. Kami juga lakukan audit internal, dan kadang melibatkan pengawas sekolah serta camat dalam mengevaluasi efektivitas program. Evaluasi ini penting untuk perbaikan kebijakan ke depan.”

Evaluasi di Kota Sukabumi dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur, memadukan pemantauan rutin dengan audit internal serta pelibatan pihak eksternal di tingkat kecamatan. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip *formative evaluation* dalam manajemen kebijakan pendidikan, di mana pengawasan dilakukan secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi masalah sejak dini, mengevaluasi efektivitas intervensi, dan menyesuaikan strategi agar tetap relevan dengan kondisi di lapangan. Menurut Gunawan *et al.* (2023) bahwa “Evaluasi kebijakan pendidikan dilakukan untuk menjamin kepatuhan terhadap kriteria yang telah ditentukan dan memberikan dampak perubahan nyata bagi penerima manfaat program”. Monitoring triwulan memberikan kesempatan bagi Dinas Pendidikan untuk mendeteksi adanya tren kenaikan atau penurunan risiko putus sekolah di setiap periode, sehingga

tindakan preventif dapat segera diambil. Sedangkan evaluasi tahunan berfungsi sebagai refleksi menyeluruh untuk mengukur keberhasilan kebijakan dalam jangka waktu lebih panjang, termasuk menilai apakah target-target strategis telah tercapai.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan APS di Kota Sukabumi telah mengarah pada model kolaboratif lintas sektor, namun keberhasilannya masih dibatasi oleh kendala teknis seperti pengolahan data, serta hambatan sosial-budaya yang memengaruhi keputusan orang tua dan anak. Integrasi teori pendidikan, prinsip pemerataan, dan pendekatan berbasis komunitas dengan hasil wawancara ini menunjukkan bahwa keberlanjutan program membutuhkan inovasi kebijakan, penguatan sistem data, dan pemberdayaan masyarakat secara simultan.

KESIMPULAN

Kebijakan penanggulangan angka putus sekolah (APS) di Kota Sukabumi berhasil menekan APS pada jenjang SD/MI hingga hampir nihil, namun masih menjadi tantangan di jenjang SMP/MTs, terutama di wilayah dengan kerentanan sosial-ekonomi tinggi. Faktor penyebab meliputi keterbatasan ekonomi, rendahnya motivasi belajar, pernikahan dini, kendala administratif, dan pengaruh budaya. Dinas Pendidikan menerapkan strategi seperti Program Pelacakan Anak Putus Sekolah (PAPS), pendampingan keluarga, pendidikan kesetaraan, dan pemetaan daerah rawan, dengan dukungan lintas sektor. Kendala utama adalah akurasi data, resistensi budaya, dan dampak kebijakan kuota rombongan belajar terhadap sekolah swasta. Bantuan pendidikan seperti BOS, PIP, dan Kartu Cerdas membantu mencegah APS, namun pemanfaatannya belum optimal. Keberhasilan kebijakan memerlukan penguatan sistem pendataan, efektivitas bantuan, inovasi program, dan pemberdayaan masyarakat untuk menjamin hak pendidikan yang merata.

REFERENSI

- Assa, Riswan, Evelin J. R. Kawung, and Juliana Lumintang. 2022. "Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Di Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara." *JURNAL ILMIAH SOCIETY* 2(1).
- Fiqih, Muhamad, Usep Dayat, and Kariena Febriantini. 2021. "Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Jenjang Sekolah Dasar." *Kinerja* 18(4).
- Gunawan, Ade, M. Arif Surham, and Muhammad Syaifuddin. 2023. "Evaluasi Kebijakan Pendidikan." *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3(1).
- Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan. 2025a. "Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Di Kota Sukabumi." *Open Data Kota Sukabumi*. Retrieved (<https://opendata.sukabumikota.go.id/dataset/angka-putus-sekolah-aps-sdmi--di-kota-sukabumi>).
- Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan. 2025b. "Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Di Kota Sukabumi." *Open Data Kota Sukabumi*. Retrieved (<https://opendata.sukabumikota.go.id/dataset/angka-putus-sekolah-aps-smpmts--di-kota-sukabumi>).
- Madaniah, Fitria, Mutakin, Siti Nurjannah, Darpin, and Meity Suryandari. 2023. "Sebab Akibat Banyak Anak Di Indonesia Yang Putus Sekolah." *Student Research Journal* 1(1).
- Paramata, Dewi Diana, Masri K. Umar, and Dewa Gede Eka Setiawan. 2024. "Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Angka Putus Sekolah (APS) Untuk Pencapaian Target SDGs." *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)* 13(2).
- Perwita, Dyah, and Retno Widuri. 2022. "Telaah Pendidikan: Preferensi Orang Tua Memilih Sekolah Swasta Daripada Sekolah Negeri." *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya* 11(1).
- Redaksi. 2025a. "Ini Upaya Disdik Kota Sukabumi Untuk Menekan Angka Putus Sekolah."

- Radarsukabumi.Com*. Retrieved (<https://radarsukabumi.com/advetorial/ini-upaya-disdik-kota-sukabumi-untuk-menekan-angka-putus-sekolah/>).
- Redaksi. 2025b. “Tantangan Pendidikan Di Kota Sukabumi: Tingginya Angka Putus Sekolah Masih Jadi PR Besar.” *Sukabumi Kita*. Retrieved (<https://sukabumikita.id/tantangan-pendidikan-di-kota-sukabumi-tingginya-angka-putus-sekolah-masih-jadi-pr-besar/>).
- Salam, Handi. 2025. “Lapor! Sekolah Swasta Di Sukabumi Terancam Sepi Dan Tutup Akibat Kebijakan KDM.” *Radarsukabumi.Com*.
- Silalahi, Yai Naulia, Rosita Panjaitan, and Lailan Sofinah Harahap. 2025. “Analisis Perbandingan Angka Putus Sekolah Dasar Negeri Dan Swasta Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbors (K-NN).” *JITET (Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan)* 13(1).
- Sugiyono. 2020. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN KOMBINASI (MIXED METHODS)*.
- Suryana, Cucu, and Tatang Muthar. 2022. “Implementasi Konsep Pendidikan Karakter Ki Hadjar Dewantara Di Sekolah Dasar Pada Era Digital.” *JURNAL BASICEDU* 6(4).
- Zanata, Ilham, Yana Fajar Basori, and Andi Mulyadi. 2023. “Implementasi Program Kartu Cerdas Dalam Upaya Mengurangi Siswa Rawan Putus Sekolah Pada Jenjang Sekolah Dasar Di Kota Sukabumi.” *Jurnal Professional* 10(2).